

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SATUAN PERANGKAT KERJA KOTA BANDA ACEH)

Rizki Mardiana ^{*1}, Heru Fahlevi ^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: **Rizkimardiana85@yahoo.co.id ^{*1}**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kota Banda Aceh, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Total populasi sebanyak 38 Satuan Perangkat Kerja Perangkat Kota (76 pengamatan). Pemilihan populasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda. Pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Aceh.

Keywords: *Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal, Akuntansi Berbasis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.*

1. Pendahuluan

Pengertian kualitas laporan keuangan hingga saat ini masih beragam, namun pada prinsipnya pengertian kualitas laporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. laporan keuangan dikatakan tinggi/berkualitas jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan datang.

Pandangan kedua menyatakan kualitas laporan keuangan berkaitan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Hubungan yang semakin kuat antara labadengan imbalan pasar menunjukkan informasi laporan keuangan tersebut semakin tinggi. Dengan demikian kualitas laporan keuangan merupakan konstruk yang dapat dianalisis dalam dua pandangan, yaitu kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan

kas dan laba itu sendiri, atau kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan imbalan saham.

Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil penelitian yang menguji kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2010)

menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Christanti (2010) Sedangkan pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2014) menemukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Kajian Pustaka

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Roviyanti (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan pengendalian internal yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.2 Pemahaman Akuntansi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) 'paham' mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Dalam penelitian ini seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila ia mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian menurut penelitian Yuliani (2010), untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan untuk memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akuntansi, prinsip nilai perolehan, prinsip realisasi, dan lainnya.

2.3 Pengendalian Internal

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu keterandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di pemerintah menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan/ monitoring.

2.4 Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya (Abdul, 2007).

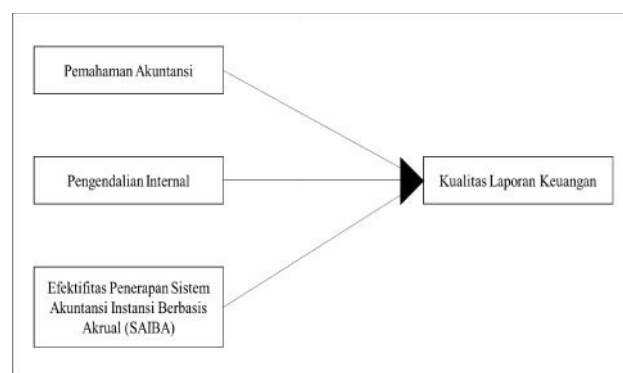
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure (Christanti, 2010).

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan

sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran. Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) digunakan sampai dengan tahun anggaran 2014. Mulai tahun 2015 basis akrual diterapkan pada Pemerintah Pusat untuk menghasilkan laporan keuangan. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Sistem ini diterapkan secara paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi sesuai dengan pentahapannya (Christanti, 2010).

Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan lebih baik dapat lihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

H2: Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

H3: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

H4: Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006). Sampel merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang dipilih secara cermat agar mewakili populasi itu. Dalam penelitian ini, populasinya adalah SKPK yang ada di pemerintahan kota Banda Aceh yang berjumlah 39 SKPK Banda Aceh dan tiap SKPK diwakili oleh 2 orang yaitu kepala SKPK dan kepala bagian keuangan sebagai respondennya yaitu berjumlah sebanyak 76 responden.

Berdasarkan kriteria diuarikan di atas maka jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Table 3.1

Tabel 3.1
Daftar Populasi dan Jumlah Responden Penelitian pada SKPK

No	Nama SKPD	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	3
3	Sekretariat Baitul Mal	3
4	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3
5	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3
6	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	3
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3
8	Dinas Kesehatan	3
9	Dinas Pekerjaan Umum	3
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3
12	Dinas Kependudukan dan	3

No	Nama SKPD	Jumlah Responden
	Pencatatan Sipil	
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3
14	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	3
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
16	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	3
17	Dinas Syariah Islam	3
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3
21	Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	3
22	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3
23	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3
24	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3
25	Kantor Pemadam Kebakaran	3
26	Kantor Lingkungan Hidup	3
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	3
28	Inspektorat	3
29	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	3
30	Kecamatan Baiturrahman	3
31	Kecamatan Kuta Alam	3
32	Kecamatan Syiah Kuala	3
33	Kecamatan Meuraxa	3
34	Kecamatan Ulee Kareng	3
35	Kecamatan Lueng Bata	3
36	Kecamatan Banda Raya	3
37	Kecamatan Jaya Baru	3
38	Kecamatan Kuta Raja	3
	Jumlah	114

Sumber: LAKIP Kota Banda Aceh Tahun 2015

3.2 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa tersebut. Data

primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan kuesioner (Sekaran 2006:77).

Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana, penelitian ini dilakukan kepada seluruh jumlah populasi yang ada (Indriantoro, 2002:200). Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Kuesioner diserahkan langsung kepada responden dan diberikan waktu untuk mengisinya. Semua kuesioner akan dikumpulkan kembali oleh peneliti. Kuesioner penelitian yang akan didistribusikan adalah sebanyak 76 kuesioner.

3.3 Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Terikat

Pengertian kualitas laporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan kedua menyatakan kualitas laporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan imbalan menunjukkan informasi laporan keuangan yang tinggi (Ayres, 1994).

Penelitian kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan (Zaenal, 2009). Pendekatan pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, dan pendekatan kedua adalah sejauhmana kualitas laporan keuangan direspon oleh para pemakai laporan keuangan.

3.3.2 Variabel Bebas

3.3.2.1 Pemahaman Akuntansi

penelitian Pemahaman akuntansi adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerti benar tentang bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip

dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3.2.2 Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal menurut Arens et al., (2008:412) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku.

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu keterandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur sistem pengendalian intern dalam penelitian ini adalah lingkungan pengendalian, adanya kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan (Agoes, 2004:75).

3.3.2.3 Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas (Nunuy, 2007).

Indikator yang digunakan dalam mengukur sistem akuntansi instansi berbasis akrual adalah lingkungan pengendalian, aktifitas pengendalian, adanya pemahaman di bidang akuntansi dan pemantauan (Sutaryo, 2013). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1-5.

3.4 Metode Analisis

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

Y : Kualitas Laporan Keuangan

a : Konstanta
 b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi
 X_1 : Pemahaman Akuntansi
 X_2 : Pengendalian Internal

X_3 : Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua

4. Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	38	3,38	4,75	4,2524	,30675
Pengendalian Internal	38	3,83	5,00	4,1871	,24595
Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua	38	3,63	5,00	4,2113	,27899
Kualitas Laporan Keuangan	38	3,95	5,00	4,3724	,26981
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 22.00 (2017)

Pengujian Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel dengan jumlah responden sebanyak 76 orang, dan unit analisis sebanyak 38 SKPK di wilayah Banda Aceh. Untuk variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan indikator diperoleh nilai terendah sebesar 3,95. Nilai tertinggi sebesar 5,00. Nilai rata-rata sebesar 4,3724 yang terjadi pada SKPK Kota Banda Aceh dengan standar deviasi sebesar 0,26981 lebih besar nilai rata-rata yang berarti bahwa variasi data kualitas laporan keuangan terhadap rata-ratanya adalah tinggi. Jadi, hampir semua SKPK Kota Banda Aceh mempunyai laporan keuangan yang berkualitas.

Variabel independen (X_1) adalah Pemahaman Akuntansi menunjukkan nilai terendah sebesar 3,38. Nilai tertinggi sebesar 4,75. Nilai rata-rata sebesar 4,2524 terjadi pada SKPK Banda Aceh dengan standar deviasi sebesar 0,30675 lebih besar nilai rata-rata yang berarti bahwa variasi data kualitas laporan keuangan terhadap rata-ratanya adalah tinggi. Jadi, hampir semua SKPK Kota Banda Aceh mempunyai pemahaman akuntansi yang baik.

Variabel independen (X_2) adalah Pengendalian Internal menunjukkan nilai terendah sebesar 3,83. Nilai tertinggi sebesar 5,00 terjadi pada SKPK Banda Aceh. Nilai rata-rata sebesar 4,1871 dengan standar deviasi sebesar 0,24595 lebih besar nilai rata-rata yang berarti bahwa variasi data kualitas laporan keuangan terhadap rata-ratanya adalah tinggi. Jadi, hampir semua SKPK Kota Banda Aceh mempunyai pengendalian internal yang baik.

Variabel independen (X_3) adalah Efektivitas Penerapan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua menunjukkan nilai terendah sebesar 3,63. Nilai tertinggi sebesar 5,00. Nilai rata-rata sebesar 4,2113 terjadi pada SKPK Banda Aceh dengan standar deviasi sebesar 0,27899 lebih besar nilai rata-rata yang berarti bahwa variasi data kualitas laporan keuangan terhadap rata-ratanya adalah tinggi. Jadi, hampir semua SKPK Kota Banda Aceh menerapkan akuntansi berbasis akrual secara efektif.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan yang dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.
- 2) Pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Efektivitas penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Penelitian Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, Berikut beberapa saran yang ditemukan yaitu:

- 1) Para penyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPK memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda (tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi). Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi ditempatkan pada bagian keuangan di SKPD tersebut hendaknya diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi.
- 2) Dalam pengendalian internal yang ada pada pemerintahan, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara mendadak. Agar dapat mendukung meningkatkan kualitas laporan keuangan. Instansi terkait juga diharapkan tetap menjaga hubungan yang baik. Aparat pengawas intern pemerintah juga harus meningkatkan fungsinya. Karena dengan hubungan kerja yang baik, maka setiap fungsi dalam mengerjakan tugasnya masing-masing bisa lebih baik dan efektif.
- 3) Sebaiknya pemerintah segera menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara efektif lagi. Demi mendukung peraturan no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berdasarkan basis akrual telah dibuat. Diharapkan juga setiap sumber daya manusia yang ada yaitu yang memiliki tugas membuat laporan keuangan diberikan pengetahuan yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena dianggap bahwa sistem akuntansi berbasis akrual lebih efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan setiap pegawai yang mengerti dapat berbagi ilmunya kepada pegawai lain yang belum mengerti.
- 4) Kualitas laporan keuangan pemerintah lebih ditingkatkan lagi dengan cara menjalankan pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan sistem akuntansi berbasis akrual secara bersamaan, karena menurut hasil penelitian jika ketiga hal ini dijalankan secara bersamaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk

melaksanakan pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan sistem akuntansi berbasis akrual yang optimal tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan dan pemerintah juga harus mendukung sarana-prasarana yang tersedia agar dapat memudahkan setiap pekerjaan pegawai demi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat setiap periodenya.

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

ini Kepada peneliti selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat ditemukan yaitu:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan bisa mengambil sampel yang lebih luas. Dianjurkan pula memakai path analysis dan diharapkan penelitian tidak hanya pada satu kota saja.
- 2) Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. Seperti memperbaiki item-item pertanyaan dalam kuesioner atau penggunaan indikator yang berbeda untuk pengukuran setiap variabel. Kemudian mengganti teknik pengumpulan data dari kuesioner menjadi wawancara ataupun teknik lainnya demi meminimalisir permasalahan subjektivitas dan keseriusan responden.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Ayres, F.L. 1994. Perceptions of Earnings Quality: What Managers Need To Know. *Management Accounting*.75: 27-29.
- Beneish, M. And M. Vargus. 2002. "Insider Trading, Earnings Quality, and Accrual Mispricing." *The Accounting Review* 77, no.4.

- Christanti, D.N. 2010. *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Chan, K., L. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok. 2004. "Earnings Quality and Stock Returns." Working Paper, Department of Finance, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Cohen, D.A. "Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences." Working Paper, Northwestern University Collins.
- Cohen, D.A. 2006. "Does Information Risk Really Matter? An Analysis of the Determinants and Economic Consequences of Financial Reporting Quality." Working Paper, Northwestern University Collins.
- Desmiyawati. 2001. *Pengaruh Strategis Bisnis dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: PPS UGM.
- Dewi, P.A.R. & Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8: 442-457.
- Fanani, Zaenal. 2009. Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 6: 20-45.
- Francis, J., R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. "Costs of Equity and Earnings Attributes." *The Accounting Review* 79, no.4.
- Francis, J., R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2005. "The Market Pricing of Earnings Quality." *Journal of Accounting and Economics* 29.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. 2006. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harifan, Handoko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Padang*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- International Federation of Accountants (IFAC)*. 2002. *Proposed Framework for International Education Standard for Professional Accountants*.
- Jusup, A. H. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mohammadi, Saman. Mohammadhadi Maher, & Sahar Zare. 2012. Implementation of Full Accrual Basis in Governmental Organizations. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4: 287-298.
- Pagalung, G. 2006. "Kualitas Laba: Faktor-Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonominya." Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Paulsson, Gert. 2006. Accrual Accounting in the Public Sector: Experiences from the Central Government in Sweden. *Financial Accountability & Management*. 22: 47-62.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Ramezan, Majid. 2009. Measuring the Effectiveness of Human Resource Information System in National Iranian Oil Company (An Empirical Assesment). *Iranian Journal of Management Studies*, 2(2): 129-145.
- Richardson, S. "Earnings Quality and Short Sellers." Supplement. *Accounting Horizons* (2003): 49-61
- Richardson, S., R. Sloan, M. Soliman, and I. Tuna. 2001. "Information In Accruals About The Quality of Earnings." "Working Paper, University of Michigan Business School".

- Roviyanti, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Universitas Siliwangi*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi berbasis akrual*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Schipper, K. 2004. *Earnings Quality*. Working Paper in Asia Pacific Journal of Accounting and Economics Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, January 2004.
- Sutaryo., Payamta, & Hermin Arifianti. 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi*, 12: 2477-2505.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, & Usman Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3: 206-220.